

## **Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Di Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua**

**Oleh  
Yulius Sondegau<sup>1</sup>**

### ***Abstract***

*The purpose of this research is to know the policy implementation national community empowerment program in rural independent Sugapa District Intan Jaya district of Papua province. To find out the results of the national community empowerment program in rural independent Sugapa District Intan Jaya district using basic survey with qualitative research. The research location is set in Sugapa District Office. Background of writing title policies regarding the implementation of the national program of rural self-empowerment, how important they were in the field through this program is based on sufficient capital to a good cause. why the program is not maximized. The factors that influence was lack of human resources, education levels are still low, inadequate number of staff empowerment and expertise to the lack of relations between the government in the District Sugapa as executor in the district with the district governments Intan Jaya as those under center in the area.*

***Keywords: Policy Implementation, Community Empowerment***

### **PENDAHULUAN**

Sebelum pemerintah mencanangkan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan, di Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya terdapat banyak persoalan dalam hal kemiskinan dan pengangguran, akibatnya terjadi konflik sosial antar marga dengan marga sering terjadi, tidak ada lapangan kerja dan suatu persoalan kecil saja banyak orang yang kumpul untuk menyelesaikan maupun memupukkan masalah akhirnya terjadi konflik antara masyarakat. Namun sekarang adanya program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan ada perubahan dalam hal tingkatan kemiskinan dan pengangguran karena banyak yang terlibat dalam program pnpm mandiri pedesaan sehingga pengangguran dan kemiskinan sudah menurun. Strategi Penanganan kemiskinan tidak hanya

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Prog. Studi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi

nuansa material namun juga ada makna perubahan cultural (Huraerah 2008; 20)

Di Distrik Sugapa terdapat berapa Kampung yaitu: Enam belas kampung tertinggal, Yokatapa, Wandoga, Bilogai, Mamba, Yoparu, Egnemba, Titigi, Jalai, Puyagia, Mindau, Emondi, Degeabu, Mbilundoga, Kumbalagupa, Ndugusiga, Ugimba diantara berapa kampung ini yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan dan factor apa yang penghambat di enam kampung tersebut.

Implementasi kebikan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan pada intinya suatu program terobosan dari pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran pada masyarakatnya, agar melalui program ini masyarakat memberdayakan potensi daerah dan memberdayakan potensi masyarakat mereka. Dimana program ini memiliki dua program utama yaitu bantuan modal dan pembangunan sarana prasarana penunjang ekonomi pedesaan, Distrik Sugapa adalah salah satu Distrik tertua dari Kabupaten induk Paniai yang memiliki banyak potensi daerah. Program ini menjadi suatu saluran peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu dan kemandirian masyarakat. Sebagian besar penduduk Distrik Sugapa adalah rata-rata petani dimana semua tersebar dimasing-masing kampung yang ada sehingga dengan adanya bantuan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang sebagian besar menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, sebab masyarakat Distrik tersebut mata pencarian adalah bercocok tanam dan berburuh.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan di Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua.

## TINJAUAN PUSTAKA

## **Konsep Implementasi**

Dalam studi kebijakan publik, dikatakan bahwa implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan.

Pengertian yang sangat sederhana tentang implementasi adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Charles O. Jones (1991), dimana implementasi diartikan sebagai Tetapi dibalik kesederhanaan rumusan yang demikian berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah.

Van Meter dan Horn (1978:70) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut : Definisi tersebut memberikan makna bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil, yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan.

Dengan mengacu pada pendapat tersebut, dapat diambil pengertian bahwa sumber-sumber untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan, di dalamnya mencakup : manusia, dana, dan kemampuan organisasi; yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta (individu ataupun kelompok).

Kebijakan public yang dilakukan akan meliputi hamper pada setiap bidang kehidupan manusia ia berwujud dalam penyelesaian konflik, pemberian tanda penghargaan kepada anggota-anggota masyarakat, pungutan pajak, pengaturan perkawinan, dan sebagainya. beberapa ahli memandang studi kebijakan

publik merupakan dimensi baru dalam administrasi publik yang diambilnya tentu ditujukan untuk melayani kepentingan rayat banyak.

S. Prajudi Admosudirdjo(1989:158-159) mengatakan bahwa kebijakan itu merupakan upaya atau usaha untuk menjawab suatu problem (oleh karena pada umumnya didalam praktek kehidupan sehari-hari tidak ada problem tunggal namun selalu merupakan sekelompok masalah-masalah berkaitan kelompok masalah lain secara erat) yang tertentu, dengan mempergunakan sarana-sarana atau instrument-instrument policy yang tertentu, dan menurut suatu urutan waktu yang tertentu pula.

Definisi kebijakan yang tersebut di atas, menggambarkan pada masalah-masalah yang tengah dihadapi oleh sekelompok masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, namun secara makro tidak ditunjukkan bagaimana cara untuk menghadapinya. kebijakan harus memberikan dampak yang positif pada lingkungan masyarakat.

Kebijakan menunjuk pada kerangka kerja pembangunan, memberikan pedoman bagi mengimplementasikan tujuan-tujuan pembangunan kedalam beragam program dan proyek. kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Kebijakan merupakan hasil akhir dan suatu keputusan yang bersifat sah dan mengikat bagi pelakunya.

## **Konsep Dasar Dalam Kebijaksanaan Negara**

Dr. Solichin Abdul Wahab, M.A. Dalam buku (Analisis Kebijaksanaan), Definisi kebijaksanaan Negara yang dikutip oleh Jones, yang menjelaskan bahwa kebijaksanaan Negara adalah antara hubungan di antara unit pemerintah tertentu dengan lingkungannya.

Menurut W.I. Jenkins (1978: 15) merumuskan kebijaksanaan Negara sebagai; serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu, pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

Secara harifah ilmu kebijakan adalah terjemahan langsung dari kata policy science (Dror,1968:6-8). Beberapa penulis besar dalam ilmu ini, seperti William Dunn, Charles Jones, Lee Friedman, dll menggunakan istilah public policy dan public policy analysis dalam pengertian yang tidak berbeda. Istilah kebijaksanaan atau kebijakan yang diterjemahkan dari kata policy memang biasanya dikaitkan dengan Keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai kewewenang atau kuasa untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggungjawab melayani kepentingan umum.

## **Pemberdayaan masyarakat**

Ciri-ciri dan manajemen yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

1. Secara tertahap prakarsa dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pedesaan harus diletakan kepada masyarakat sendiri.
2. Kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasi sumber-sumber yang harus ditingkatkan.
3. Memperhatikan
4. Menekankan antara birokrasi pemerintah dengan komunitas,dan
5. Membentuk jaringan antara birokrasi pemerintah dengan lembaga sosial masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai social konsep ini mencerminkan pradigma baru pembangunan.

Menurut Agus Surjono dan Trilaksono Nugroho(2007:26-27) mengatakan bahwa: pada dasarnya,pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat ( khususnya yang kurang memiliki akses kepada sumber daya pembangunan) didorong untuk meningkatkan kemandirian dalam mengembangkan kehidupan mereka.

Menurut Y.C. Yen dalam Islami (2004:27) mengatakan bahwa setiap penggerak pembangunan yang akan memberdayakan masyarakat harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mendatangi masyarakat yang hendak diberdayakan
2. Hidup dan tinggallah dengan mereka agar kita mengenal dengan baik kepentingan dan kebutuhan.
3. Belajarlah dan mereka supaya dapat dipahami apa yang ada dibenak mereka supaya dapat dipahami apa yang ada dibenak mereka, potensi apa yang mereka memiliki.
4. Ajak dan ikut sertakan masyarakat dalam proses perencanaan.
5. Ajak dan libatkan mereka dalam peruses pelaksanaan
6. Mulailah dan apa yang masyarakat ketahui dan pahami
7. Jangan berikan penyelesaian akhir pada mereka tetapi beri kebebasan kepada mereka sendiri untuk menyelesaikan masalahnya.

Pada aspek lain, pemberdayaan sangat terkait dengan kemitraan yaitu melibatkan unsur-unsur yang memiliki status sejajar dalam perumusan kebijakan pembangunan. Berdasarkan uraian di atas, dapat dimaknai bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menembangkan diri secara proposional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategis untuk mencapai suatu pembangunan dalam jangka panjang.

## **Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh faktor yang saling berkaitan dengan tingkat pendapatan, kesehatan, akses, terhadap barang dan jasa, kreasi dangender serta kondisi lingkungan. Dalam hal ini kalau melihat sterategi nasional penanggulangan kemiskinan didefinisikan, kemiskinan tersebut yang di akibatkan oleh ketidakmampuan seseorang atau kelompok orang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti untuk makan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi dan lain-lain.

Kemiskinan tidak lagi mempergaruhi hanya sebatas ketidak mampuan ekonomi, tetap juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbudakan, perlakuan seseorang atau kelompok dalam menjalani kehidupan secara bermartabat artinya, masalah kemiskinan dilihat bahwakebutuhan

masyarakat itu bermacam-macam sehingga masalah kemiskinan manusia dipandang dan berbagaisegi. Menurut SmerudanSoeharto(2005 7-8)

## **Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan**

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan merupakan upaya untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan penduduk miskin dalam rangka memperbaiki taraf hidupnya dengan membuka kesempatan berusaha yang diarahkan pada pengembangan kegiatan social ekonomi yang mewujudkan kemandirian penduduk miskin dengan menerapkan prinsip gotong royong, kewaspadaan, dan partisipasi yang memiliki pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan demikian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan sesuai dengan Inpres Nomor 5 tahun 1993 tentang penanggulangan kemiskinan dikemukakan bahwa: “Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dimaksudkan untuk menanggulangi kemiskinan masyarakat pedesaan melalui modal usaha dan penyediaan sarana yang menujung ekonomi pedesaan. Juga merupakan proses pembelajaran bagi masyarakat. Melalui kegiatan pengambilan keputusan yang demokratis, dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pelestarian kegiatan”

Keberhasilan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan tergantung pada motivasi yang timbul dari masyarakat itu sendiri yang disebabkan oleh adanya peluang bagi peran aktif masyarakat dan dibebaskan mereka untuk memutuskan pilihan kegiatan secara demokratis. Dengan demikian mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. hal inilah yang menjadi wujud dan pemberdayaan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Data diperoleh dengan observasi atau pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang kemudian peneliti akan menggunakan instrumen pendukung yaitu pedoman wawancara. Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah terdiri dari tiga tahap yakni, reduksi data, verifikasi data dan penyajian data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kebijakan PNPM Mandiri Pedesaan**

Jika kita berbicara mengenai implementasi kebijakan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan di Distrik Sugapa maka pembahasan penelitian yang akan memfokuskan pada poin-poin yang ada yakni mengenai penelitian program yang ada, bagaimana pengelolaan dan pemberdayaan yang ada, relasi antara pemerintah dalam hal ini, pemerintah Distrik dan pengelola program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan yang ada, isi implementasi dan kebijakan yang dihasilkan, apakah semua itu memang menjadi kebutuhan masyarakat di Distrik Sugapa sampai pada mengimplementasikan kebijakan di lapangan.

#### **1. Penilaian**

Penilaian merupakan unsure pertama dalam mengukur sebuah implementasi kebijakan yang telah di implementasikan dalam kurun waktu tertentu. Indikator penilaian ini tidak hanya tertunjuk pada hal-hal yang bersifat sarana menunjang kegiatan organisasi, namun unsure yang lebih penting adalah menilai kebijakan pemerintah meliputi isi dan sasaran kebijakan serta dampak yang dihasilkan. Penilaian tidak hanya sekedar menghasilkan sebuah kesimpulan mengenai tercapai atau tidaknya sebuah kebijakan atau masalah telah terselesaikan penilaian juga berfungsi sebagai klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, penilaian terhadap evaluasi program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan di Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya diarahkan pada penanggulangan kemiskinan di pedesaan melalui dua program utama yakni pemberian modal usaha bagi masyarakat serta pembangunan sarana dan prasarana ekonomi yang menunjang perekonomian masyarakat.

Dari indikator yang ada mengenai penilaian pengelolaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan melalui wawancara

penulis dengan penguna PNPM mandiri pedesaan Pile tanggal 15 Februari 2015 sebagai berikut:

Menurut saya dengan dasar pendidikan saya yang hanya tamatan SMA, pemberian bantuan melalui program ini sangat membantu saya, dengan waktu yang cukup dalam mengembalikan modal usaha saya dapat mengembangkan usaha yakni penjualan buah dan sayur dipasar dengan baik dan lancar hingga sekarang. Bukan saja modal namun juga dalam hal bantuan sarana dan prasarana yakni: Daun seng, skup, bibit sayur, ada pula anak tidak mampu berikan atribut sekolah berupa tas pakaian, sepatu, dan lain sebagainya. Sehingga melalui program ini kami masyarakat Distrik Sugapa sampai saat ini lumayan memuaskan adanya program pemerintah tersebut ini.

Dalam poin diatas penulis melihat bagaimanapenomena yang adamengenai rendahnya sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat namun dengan adanya bantuan pemerintah dan dengan adanya suatu motivasi yang baik dan masyarakat bukan menjadi suatu masalah maka ketika relasi terjadi antara masyarakat dan pemerintah yang ada kesejahteraan bisa ditingkatkan dan berbagai sektor kehidupan.

## **2. Kemampuan Pemerintah**

Pemerintah adalah pusat kontrol dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan tingkatan dan hirarki kedudukan yang memiliki pemerintah memiliki suatu kedudukan yang sangat penting dalam semua implementasi kegiatan dalam masyarakat. Camat sebagai pemimpin tertinggi di Distrik memiliki kedudukan yang sentral baik dalam perencanaan, pembuatan kebijakan sampai pada pelaksanaan dan pengawasan program yang ada di setiap kampung.

Distrik Sugapa adalah suatu Distrik yang cukup mandiri dimana indikator penilaian dapat dilihat dan cara dan pola pengelolaan sumberdaya yang ada dimasing-masing kampung, relasi antara pemerintah Distrik dan pengurus kampung, sampai pada pembagian tugas yang menyangkut kepentingan masyarakat. Dari pengamatan penulis di Distrik ini member ruang bagi setiap kampung dalam mengembangkan semua potensi yang ada baik dalam sumber daya alam jasa atau pun organisasi pembangunan seperti koperasi dan usaha kelompok masyarakat lain yang adamaupun pihak pengelola program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan di Distrik Sugapa .

Indikator penilaian kemampuan pemerintah khususnya pengelolaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan juga dapat dilihat selama ini melalui kegiatan pelatihan yang dilakukan dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Dengan jumlah anggota yang masih minim peningkatan kualitas memang harus dilakukan melihat data bagaimana program ini sudah berjalan cukup lama tahun 2007 sampai sekarang yang sudah berkembang selama delapan tahun.

Selain data di atas berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti mengenai kemampuan pemerintah dengan informan Rupi pengguna PNPM Mandiri Pedesaan 16 februari 2014 sebagai berikut:

Menurut saya kemampuan yang dimiliki pengelolaan PNPM Mandiri Pedesaan sudah baik dimana saya mendapatkan pelayanan yang ramah, memberikan pemahaman tentang bagaimana kembangkan bantuan modal dari PNPM Mandiri Pedesaan dan bantuan berupa sarana dan prasarana yang diberikan oleh pelaksana program. Agar masyarakat kembangkan modal dan kembangkan sarana social serta potensi pelaku maupun potensi daerah melalui program tersebut sehingga saya dapat memahami apa yang saya lakukan.

Dan analisis yang dilakukan peneliti berdasarkan wawancara dan realita dilapangan peneliti melihat bahwa melalui program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan baik dalam pelayanan adminstrasi, pemberian informasi, dan penguasaan hingga proses pengkadernisasi yang dilakukan baik.

Berhubungan dengan Evaluasi program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan di Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan pengguna PNPM Mandiri Pedesaan 17 februari 2015 adalah :

Menurut saya kemampuan pengelolaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan di Distrik Sugapa baik saya melihat kritik dan saran berupa masukan yang memperbaiki kedepan masyarakat terima dengan baik kemudian pembangunan umum pembersihan jalan dan bikin jembatan penghubung kampung itu gotong-royong.

Berbicara mengenai kemampuan itu tentu mengenai kualitas pelayanan yang ada, mungkin di tingkat pelaksanaan sudah cukup baik, namun staf Distrik turun pendataan baik pada masyarakat miskin agar dana yang dicairkan sesuai dengan jumlah penduduk

### **3. Faktor-Faktor Penghambat**

1. Rendahnya sumber daya khususnya dalam latar belakang pendidikan yang masih rendah menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah.
2. Masih tidak adanya kesepahaman pemerintah daerah Distrik Sugapa dan pengelolaan program PNPM Mandiri Pedesaan yang di Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya.
3. Transfaransi yang masih kurang di antara pemerintah dengan pengelola PNPM Mandiri Pedesaan dan pengelola yang ada di kampung keterlambatan dana kadang membuat pembangunan menjadi terlambat.

### **PENUTUP**

Berdasarkan penjabaran dalam hasil penelitian dan pembahasan pada bagian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Evaluasi implementasi kebijakan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan di Distrik Sugapa sudah baik hal ini

dilihat dari indikator penilaian dan respon masyarakat pada program yang dilaksanakan.

2. Adapun factor penghambat masih terletak pada lingkungan adminstrasi dan birokrasi yang mengelola program.
3. Karakteristik penduduk yang sebagaian besar petani harus mendapatkan suatu perhatian yang lebih.

Atas dasar kesimpulan pada bagian sebelumnya maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Disarankan pada implementator dapat meningkatkan sumber daya yang ada melalui bentuk-bentuk bantuan dalam pengelolaan PNPM Mandiri Pedesaan di Distrik Sugapa.
2. Disarankan kepada pemerintah Distrik Sugapa agar dapat lebih mendukung program ini baik secara material maupun peningkatan kualitas staf pemberdayaan yang ada.
3. Perlunya suatu system yang sederhana dalam pemberian modal usaha.
4. Disarankan bagi pemerintah Distrik Sugapa dan pengurus kampung yang tersebar di enam belas kampung yang ada memberikan data yang akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arimbi. 1993. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*. Walhi. Jakarta
- Friedman Dalam Suharto. 2004. *Masalah Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial di Indonesia : Kecenderungan dan Isu*. Bandung, RefikaAditama.
- Khadiyanto P. 2007. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Unit Sekolah Baru* : Semarang, Penerbit: Badan Peneliti Universitas Diponegoro, Semarang.
- Loekman, S. 1995. *Menuju MasuPartisipatif* Yogyakarta : Kanisius
- Nasdiian FT. 2006 *Pengembangan Masyarakat (Community Development)*. Bogor Institut Pertanian Bogor.

Rudito, B (Ed.) 2003. *Akses Peran Serta Masyarakat*. ICSD dan Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.

Schuler, Hashemi dan Riley dalam Suarto. *Masalah Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial di Indonesia : Kecenderungan dan Isu*. Bandung. Refika Aditama. 2004

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R dan D*. Alfabeta Bandung.

Suharto Edi. 2004. *Masalah Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial di Indonesia : Kecenderungan dan Isu*. Bandung. Refika Aditama.

Soetrisno, L. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.

Soetomo, 2009 *Pembangunan Masyarakat*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Shannon, 1991. *Ekonomi Politik Pembangunan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta